



Politik Islam atau Islam Politik ?

Masalah politik Islam ramai diperbincangkan. Apalagi jika perbincangan itu diwarnai dengan pendekatan masing-masing pihak dalam membawa wacana itu ke arah pemikiran mereka. Dari sinilah timbul pertanyaan, Politik Islam atau Islam Politik? Masalah ini pernah menjadi perdebatan panjang di beberapa surat kabar ibu kota. Berikut RISALAH mewawancarai salah seorang pengamat politik yang ikut urun rembuk dalam perdebatan itu, Drs. Saiful Muzani, Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Redaktur Jurnal Ulumul Qur'an, dan seorang penulis lepas di berbagai penerbitan, di kantornya, Pusat Kajian Islam di Ciputat Jakarta.

Apa yang disebut dengan politik Islam?

Bagi saya, kalau ungkapannya adalah politik Islam, itu mengandung satu pengertian politik yang mempunyai warna Islam. Yaitu Islam sebagai ajaran, Islam sebagai doktrin, atau Islam sebagai ideologi. Artinya, kita berpolitik untuk merealisasikan nilai-nilai atau ideologi atau kepercayaan yang kita anut dalam Islam. Itu politik Islam secara umum.

Sedangkan Islam politik artinya lebih mengandung pengertian bahwa orang atau kelompok dari kita sebagai ummat Islam itu berpolitik dengan menggunakan Islam. Jadi lebih ditekankan pada faktor orang. Sebutlah lebih bersifat historis, politis, dan lebih sosiologis kira-kira begitu. Artinya, yang sesungguhnya di situ adalah persoalan kekuasaan, bukan persoalan nilai atau ideologi. Jadi orang biasanya punya keinginan atau kebutuhan atau kepentingan untuk berkuasa. Nah karena ini dalam masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dengan simbol-simbol Islam, maka orang tersebut menggunakan simbol-simbol dan atribut-atribut Islam untuk mendapatkan kekuasaan. Dan itu sah dalam dunia politik.

Apakah di Indonesia, keduanya itu (politik Islam dan Islam politik) ada?

Tergantung bagaimana kita melihat hakikat dari politik itu sendiri. Bagi orang yang percaya pada politik itu sebagai alat untuk merealisasikan ideologi atau nilai, maka orang percaya pada politik Islam. Jadi, politik disini sebagai alat saja. Tapi bagi orang yang ragu bahwa politik itu sebagai alat, maka politik itu menjadi tujuan, dalam hal ini adalah kekuasaan.

Kalau Masyumi bagaimana?

Dalam masyarakat yang sangat plural dan kompleks seperti sekarang ini, maka dibutuhkan definisi yang lebih realistik dalam melihat politik. Supaya kita tidak terjebak. Bukan berarti kita tidak percaya adanya politik Islam, kita harus lebih hati-hati supaya kita, masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mengagungkan Islam sebagai sesuatu yang luhur, kemudian tidak dimanipulasi oleh kepentingan, golongan, dan sebagainya.

Ya, itu tadi. Tergantung kita melihatnya. Jadi sebetulnya, dua versi untuk melihat hakikat politik atau kekuasaan. Sekarang pun politik Islam atau Islam politik itu ada kalau kita perhatikan orang-orang yang menggunakan istilah tersebut. Tapi bagi saya, kalau melihat politik itu sebagai realistis, maka yang sesungguhnya adalah Islam politik. Kalau melihat secara lebih realistis tidak idealis. Kita percaya pada orang atau kelompok yang menggunakan atau sarana-sarana yang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan atau sarana-sarana untuk mewujudkan ideologi Islam.

Dalam masyarakat yang sangat plural dan kompleks seperti sekarang ini, maka dibutuhkan definisi yang lebih realistik dalam melihat politik. Supaya kita tidak terjebak. Bukan berarti kita tidak percaya adanya politik Islam, kita harus lebih hati-hati supaya kita, masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mengagungkan Islam sebagai sesuatu yang luhur, kemudian tidak dimanipulasi oleh kepentingan, golongan, dsb. Maka kita harus mendefinisikan untuk Islam politik. Dengan cara begitu, kita akan kritis melihat gejala atau perilaku politik orang atau kelompok yang menggunakan simbol-simbol Islam. Kalau bicara Islam politik, maka kita bisa menggugat orang yang menggunakan simbol-simbol Islam. Sehingga masyarakat atau kita sadar dan hati-hati dengan orang yang fasih dengan simbol-simbol agama padahal mungkin saja sebenarnya apa yang dilakukannya adalah kegiatan politik atau kekuasaan. Oleh karena itu kalau kita menyebut/mendefinisikan, politik Islam itu ideologis dan tidak kritis. Tapi kalau mendefinisikannya dengan Islam politik, bagi saya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan kritisisme.

Lalu, apakah ada nilai dalam Islam politik?

Ya ada. Cuma, nilainya sesuatu yang realistik, termasuk di dalamnya jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Jadi orang menganggap posisi tertentu itu suatu nilai, ya nilainya di situ. Jadi kita duduk dalam jabatan tertentu kita merasa senang, merasa bahagia, merasa berbeda dengan yang lain, merasa berpengaruh, itu semua nilai. Cuma tadi, nilainya realistik, manusiawi, dan duniawi.

Apakah ada dalam Islam politik itu upaya merealisasikan ajaran Islam?

Saya sebut dalam Islam politik itu, kalau pun ada bukan yang utama. Yang utama adalah memobilisasi, mendapat dukungan untuk mencapai tujuan-tujuan politik seperti kekuasaan, dan sebagainya.

Kalau kita lihat sejarah politik ummat Islam Indonesia dengan cara pandang Islam politik bagaimana?

Kalau menggunakan cara itu, bagi saya politik ya politik. Jadi

pada kelompok-kelompok atau partai yang pernah muncul atau pada orang yang berideologikan Islam. Bagi saya, ideologi itu punya pengertian pejoratif, pengertiannya lebih bersifat negatif. Yakni seperangkat krisis nilai untuk legitimasi kepentingan. Kegiatan politik tanpa legitimasi itu kan sangat susah. Oleh karena itu, untuk membenarkan kepentingan yang ingin diraih seseorang atau kelompok, maka orang membutuhkan penjelasan, sistem makna. Dan itu ideologi. Ideologi kan simbol. Sedangkan simbol itu tak persis sama dengan yang disimbolkannya. Kalau itu sama, ya bukan simbol. Misalnya, kenapa seseorang mencalonkan diri menjadi anggota DPR, orang dapat mengatakan "Dengan saya menjadi anggota DPR, saya akan merealisasikan program-program keislaman." Ucapan tersebut sah dalam dunia politik. Dan ia bisa mendapatkan pengesahan dari umat Islam. Maka, hal itu tidak lebih daripada kampanye.

Mungkin pandangan ini terlalu kasar, tapi itu cara menganalisis. Dan ini lebih kritis. Karena, seringkali Islam itu lebih disubordinasikan pada kepentingan-kepentingan individual atau kelompok. Untuk itu, kita harus selalu mempertanyakannya.

Sebut saja misalnya, ketika SI itu muncul. Orang bisa mempertanyakan, SI itu apa? Apakah mau merealisasikan Islam atau nilai nilai Islam? Bagaimana merealisasikannya? Jika SI mau membela kelompok pribumi, apakah orang Islam yang non-pribumi itu tidak perlu dibela? Terus, jika SI itu membela kelompok-kelompok lemah, buruh, petani, dan sebagainya, apakah orang-orang Islam yang kaya tidak perlu dibela oleh SI? Oleh karena itu, persoalannya tidak sederhana.

Kita juga mengenal Masyumi, partai politik berideologikan Islam. Kita dapat terapkan lagi kerangka tadi. Setidak-tidaknya dapat mempertanyakan, Apakah betul orang-orang yang menyebut dirinya Masyumi memperjuangkan nilai-nilai Islam?

Tentu hal ini akan membuat marah orang-orang Masyumi. Bukan kita anti-Masyumi atau tidak suka. Akan tetapi supaya kita lihat, Islam itu yang jadi pegangan dan keyakinan bersama itu tidak mau dimanipulir oleh pihak-pihak tertentu. Tentu saja kita tidak tega mempertanyakannya, karena pertanyaannya menyakitkan, tetapi itu harus dilakukan.

Apakah selama ini ummat Islam seringkali menyikapi kondisi politik selalu dengan pandangan politik Islam?

Sementara ini ya. Kita berkali-kali terjebak. Kita kalah terus. Karena kita tidak realistis. Tapi melihat secara idealis.

Kalau sekarang, model ICMI itu bagaimana?

Ya sama, kayak hitam putih. Memang tegas dengan itu. Kita hati-hati, Apakah ICMI itu kekuasaan atau bukan. Itu sudah banyak

diperdebatkan orang.

Jadi, bagaimana kalau kita ingin lebih kritis dalam melihat sejarah?

Kalau kita ingin lebih kritis dalam melihat sejarah, ya pakailah Islam politik. Tidak mudah orang yang menggunakan Islam politik untuk dapat dimanipulasi. Orang takbir atau apa, Islam politik memandang dengan hati-hati. Apakah ketika orang itu takbir, apa dia tulus? Apakah itu suatu tindakan yang perlu? Lalu, orang yang membaca ayat al-Qur'an, itu pun tergantung, apa dia mengeluarkan nilai-nilai Islam? Ataukah dia membaca dan menafsirkan al-Qur'an itu untuk tujuan manipulasi?

Dengan demikian, kritisisme itu diperlukan, lalu bagaimana cara memasyarakatkan kritisisme ini?

Itu suatu niatan yang baik. Itu supaya lebih mandiri, tidak mudah dimobilisasi orang atau kelompok. Itu yang kita butuhkan dan itu yang sementara ini sangat lemah. Kalau masalah niatan keislaman, itu urusan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kalau mau kritis, lihatlah suatu masalah itu tidak secara positif, tetapi secara negatif.

Memang, itu tidak baik bagi tradisi kita, karena bersifat mencurigai orang. Tetapi sebetulnya sangat membantu kita.

Apakah hal ini membawa ke arah sekularisasi?

Tergantung menafsirkan itu. Sebagai Islam politik, agama menuntut supaya kita kritis. Bukannya percaya saja pada seseorang yang menyebut dirinya memperjuangkan Islam.

Tetapi, bukankah hal ini pun dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan ummat Islam?

Kita harus waspada dengan kata itu. Persatuan itu persoalan kekuasaan. Persatuan tidak ada secara alamiah. Persatuan itu direkayasa. Dalam persatuan, ada pihak yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Kita perlu hati-hati juga.

Bagaimana terhadap dekatnya Pak Harto dengan ummat Islam

belakangan ini, yang sebelumnya justru dipandang phobia (takut) terhadap Islam?

Itu terjadi, karena yang berkuasa merasa terancam. Pak Harto kan Islam, Pak Natsir juga Islam. Soekarno Islam, Wahid Hasyim

juga Islam. Tapi kenapa orang-orang Masyumi mencurigai kepercayaan Islamnya Pak Karno.

Untuk memasyarakatkan cara pandang Islam politik itu bagaimana?

Kita harus terus-menerus memakai politik Islam dalam rangka membongkar asumsi-asumsi yang biasa dimitoskan. Mereka menyebut Islam itu luhur, tapi mereka juga korupsi, bagaimana ini? Jadi, kita perlu keberagamaan yang mandiri lah. Selama ini, kita kan tidak begitu.

Bagaimana tanggapan tentang sementara tokoh muslim banyak yang menyatakan bersyukur atas apa yang dicapai oleh Indonesia, daripada yang sebelumnya?

Rasa syukur bagi orang yang beragama itu harus. Syukur itu harus sambil diupayakan untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kalau masalah syukur itu sendiri ya nggak usah diomongin, kita shalat kan syukur juga. Kalau diomongin, itu kan bersifat politis. Itu kan mobilisasi. Lepas dari niat baik para tokoh muslim itu. Kita tetap harus cermat dan hati-hati, kepada leluhur tokoh-tokoh muslim sekalipun.

Bagaimana pendewasaan

kritisisme masyarakat itu?

Itu tidak mudah. Kita harus titik beratkan pada pendidikan. Pendidikan itu sebagai sarana untuk mendapatkan keterampilan, juga untuk lebih berwawasan dan lebih manusiawi.

Tetapi kan sistem pendidikan Indonesia itu pun bersifat represif juga kan?

Perlu waktu juga untuk perubahan itu. Bukan sesuatu yang mudah dalam memasyarakatkannya. Dan, pendidikan itu bukan hanya formal. Maka, tidak mesti formal, misalnya bergaul dengan intelektual, dan sebagainya.

Tetapi ada anggapan kritisisme itu kan karena posisinya termarginalisasi?

Untuk itulah dibutuhkannya orang yang konsisten. Orang yang konsisten, walaupun jadi orang berkuasa tetap kritis. Kritis itu punya motif. Memang, orang yang dirugikan itu kritis. Orang yang kritis biasanya orang yang tidak mendapatkan yang diinginkannya. Maka, banyak orang kritis yang mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak kritis lagi. Tetapi semuanya itu proses, karena selalu ada orang yang kritis lagi. Jadi, ada keseimbangan baru. Dan keseimbangan itu tidak stationer (tidak tetap). □ M.TAUFIQ RM.

